

RELASI POLISI-MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KONFLIK: Sebuah Eksplorasi

Oleh : Sutrisno*

Menyoal 'Metodologi' Pengukuran Kinerja Polisi

Dalam wawancara dengan kalangan masyarakat Jawa Tengah yang terdiri dari partai politik, Komisi Pemilihan Umum, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama diperoleh persepsi positif terhadap kinerja polisi dalam pengamanan kampanye.¹

Kesimpulannya polisi telah melakukan tugas dengan cukup baik. Agak sedikit berbeda hasil yang diperoleh dari kalangan LSM, relatif kritis, mereka memberi beberapa catatan mendasar bagi polisi dalam mengamankan kampanye yang ke depan perlu diperbaiki utamanya menyangkut profesionalisme. Respon dari kalangan masyarakat tentu saja akan menjadi bahan masukan bagi Polri dalam setiap evaluasi, untuk ke depan sebagai bahan 'menggodok'

strategi, teknik dan taktik polisi dalam mengamankan kampanye atau pengendalian umumnya massa.

Kalau kinerja Polisi disandarkan pada penilaian masyarakat, secara metodologis masih menyisakan persoalan mendasar berkenaan dengan keabsyahan pengukuran semacam ini. Meminjam istilah emile Durkheim masih ada persoalan *legitimate* dalam proses metodologi semacam ini. Namun justru inilah yang terjadi selama ini, pengukuran kinerja polisi didasarkan pada persepsi masyarakat dipandang telah memenuhi kriteria yang berlaku umum. Kinerja polisi disebut baik manakala masyarakat mempersepsikannya sebagai baik, dan sebaliknya jika masyarakat menganggap kinerja polisi buruk maka buruklah kinerjanya.

Pendapat semacam ini, di antaranya dikemukakan oleh Kepala

* Dosen Mata Kuliah *Konflik Sosial* dan *Sosiologi* pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Devisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Irjen Pol. Basyir A. Barmawi.² Alasannya polisi pada dasarnya pelayan masyarakat, maka masyarakat dalam konteks ini sebagai *user*. Maka *user* pulalah yang menilainya. Polisi berbintang satu kelahiran 1949 ini menulis, "...ukuran keberhasilan tugas-tugas kepolisian lebih banyak ditentukan oleh puas tidaknya masyarakat yang harus dilayani".

Penilaian kinerja polisi semacam ini bukan hanya di Indonesia, di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan Jepang juga menggunakan hal yang sama. Di banyak negara bagian Amerika, misalnya, keamanan selain menjadi komoditas politik seorang gubernur sekaligus terkait langsung dengan promosi (kepala) kepolisian, dan - sekali lagi - semua itu bersandar kepada persepsi masyarakat tentang keamanan.

Di samping memang ada diskusi-diskusi yang sangat khusus me-

ngangkat angka-angka kejahatan sebagai komoditas promosi maupun menjatuhkan lawan, tapi ini lagi-lagi dalam sebuah diskusi pada level eksklusif. Lebih dari itu, persoalan kualitatif penyelesaian persoalan-persoalan di masyarakat yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang seringkali tidak paralel dengan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh (kepala) polisi sebagai kreativitas pada level-level wilayah tertentu di Indonesia jarang sekali, atau mungkin tidak bisa dievaluasi dalam menilai sistem kerjanya.

Terdapat dua persoalan mendasar dalam menggunakan persepsi masyarakat sebagai indikator keberhasilan kinerja polisi. *Pertama*, bahwa persepsi bukanlah "realitas"-nya.³ Misalnya, "pohon" hanyalah sebuah konsep atau logo atau lambang tentang pohon, oleh karena itu konsep pohon bukanlah bendanya. Persepsi tentang kinerja bukanlah kerjanya.

2. Lihat Stanley (Edt). 2004. *Keamanan, Demokrasi, dan Pemilu 2004*, Propatria, Jakarta. Hal. 67-81.

3. W.I. Thomas, seorang sosiolog Amerika menekankan kuatnya persepsi terhadap hadirnya kenyataan, artinya kemudian persepsi itu sendiri adalah kenyataan, begitu pula Peter Berger dalam *Social Construction of Reality*. Persoalannya, hemat saya hadirnya teori-teori semacam ini justru sebagai pengantar tentang adanya 'kebenaran' lain di balik realitas termasuk kebenaran di luar yang dipersepsikan masyarakat. Kesadaran semacam ini bukan sekadar berhenti pada para teoretikus tetapi persebarannya dibantu oleh dunia media massa dan teknologi net yang membuat dunia bukan lagi seperti 'apa adanya' tetapi penuh tafsir-tafsir.

Kedua, siapa yang dimaksud "masyarakat". Bahayanya menyandarkan kinerja polisi pada persepsi adalah sama dengan undangan terhadap permainan hegemoni atas realitas. Dalam kondisi ini (kepala) polisi yang menguasai "wacana" semata-mata yang mendapat prestasi. Artinya, persepsi⁴ bagaimanapun dapat 'dimainkan' dengan cara menelakung dan menguasai atau paling tidak memberi warna pada sumber-sumber wacana publik.

Dalam ilustrasi di atas, penelitian berdasar persepsi disimpulkan secara umum bahwa polisi berhasil menjalankan tugas pengamanan. Yang menarik dipertanyakan, siapa yang menilai atau apa yang disebut "masyarakat" dan bagaimana penilaian itu. Kembali kita cermati sampel penelitian di atas (sampling semacam ini mengikuti penelitian pada umumnya), Parpol, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama, KPU, Panwaslu hampir mempunyai persepsi yang homogen dalam menilai kinerja Polisi. Dalam konstelasi hegemoni sejumlah sampel yang

disebut ini mempunyai intensitas 'kedekatan' terhadap sumber informasi yang sama tentang polisi. Posisi sosial (*social status*) mereka adalah orang-orang yang sangat terbiasa berinteraksi dan 'berurusan' dengan polisi. Lain dengan LSM, tidak begitu intens interaksi dengan polisi, mempunyai pandangan kritis, berbanding lurus dengan persepsinya terhadap polisi.

Belum lagi kajian melalui analisis konten media massa. Yang sangat mengejutkan, dari temuan kajian media massa penelitian ini ditemukan hasil yang ironis, kalau tidak dapat dikatakan kontradiktif dengan hasil temuan penelitian dari hasil wawancara. Hemat saya masih dapat diperdebatkan panjang lebar, mana yang lebih representatif antara sampel wawancara yang dilakukan secara purposif di atas dengan suara masyarakat di media massa yang diambil dari rubrik Suara Pembaca.

Jika dirumuskan dalam bentuk proposisi, posisi sosial seseorang

4. Kebenaran persepsi (bersifat persepsional) secara epistemologis masuk pada jenis kebenaran korespondensi. Kebenaran ini hadir melalui konstruksi sosial, bisa dalam bentuk kesepakatan sosial atau bisa juga melalui dominasi. Jenis kebenaran yang lain adalah kebenaran koherensi. Kehadiran kebenaran jenis ini bukan melalui konstruksi sosial, karena itu kebenaran jenis ini disebut juga sebagai kebenaran "di dalam dirinya" (*The truth in it self*). Contoh ekstrim adalah pada hukum matematika bukanlah hasil kesepakatan, $2+2=4$ adalah kebenaran "di dalam dirinya".

akan menempatkan dirinya dalam mengakses informasi dari sumber-sumber informasi yang di-*create* oleh institusi yang berkepentingan terhadap cetak-biru warna informasi.

Dimensi-dimensi hegemoni ini menempatkan jarak sosial yang berbeda-beda antara elemen-elemen masyarakat dengan polisi. Polisi dalam dimensi hegemoni ini lebih dapat 'menguasi' kesadaran tokoh masyarakat, tokoh agama atau partai politik dibandingkan dengan LSM. LSM mempunyai jarak sosial yang paling jauh di antara elemen-elemen masyarakat lain dalam 'berurusan' dengan polisi. Secara hermenetis istilah 'berurusan' (menggunakan apostrop) karena bermakna ganda, bagi LSM istilah ini berarti dirinya bermasalah dengan hukum dan ketertiban masyarakat yang (diduga) didakwakan kepadanya oleh polisi.

Bagi partai politik dan tokoh masyarakat dan bagi banyak aktor dari lembaga resmi negara istilah itu tidak selalu mengandung pengertian normatif.

Meminjam struktur pemikiran Foucaultian⁵, konsep hegemoni yang dilahirkan Antonio Gramsci 70 tahun yang lalu tidak sepenuhnya relevan untuk memahami realitas sosial hari ini di mana kekuasaan telah "meleleh". Negara, dalam konsepsi hegemoni versi Gramsci dipandang sebagai segelintir orang yang menguasai alat produksi atas definisi realitas. Ini betul jika menatap kondisi pada sekitar lima puluh tahun yang lalu ketika kekuasaan masih terkonsentrasi pada satu lembaga. Energi yang melelehkan kekuasaan itu adalah demokrasi yang secara monumental (revolusioner) praktiknya pada tahun 70-an⁶.

⁵ Michael Foucault (meninggal tahun 1980) oleh George Ritzer (2004; 607-628) diidentifikasi dalam Sosiologi Post-Modernis. Karyanya berangkat dari eksplorasi tentang seks (*The History of Sexuality* ; 1980-an), dalam pengembangan tulisan selanjutnya seks direlasikan dengan kekuasaan. Di sini kemudian kekuasaan didekonstruksi dalam pengertian yang sublim tapi sangat inspiratif bagi para pengikutnya. Ada kesan timpang tanpa menyebut Jeques Derrida terhadap topik ini. Ia menaruh perhatian pada *decentering*, tulis Ritzer (2004 ; 609), "dalam beberapa hal, Derrida ingin theater menjauh dari pusat tradisionalnya, menjauh dari pemusatan perhatiannya pada penulis skenario (penguasa) dan dari harapan penulisnya dan memberi aktor peran yang lebih bebas".

⁶ Lihat misalnya John Markoff (2002), dan juga Gulerimo O'Donnel (1993).

Kerangka ini sangat membantu dalam memahami betapa negara dan instrumen lembaga negara (kekuasaan) semacam polisi tidak lagi bisa sepenuhnya menguasai sumber-sumber definisi atas realitas dalam masyarakat. Meskipun diasumsikan polisi telah melakukan kinerja maksimal (sekali lagi, ini hanya sebuah asumsi) namun tetap saja 'keberhasilan tugas polisi' adalah produk dari sebuah definisi yang dikonstruksi secara sosial. Oleh karena itu dalam ilustrasi di atas yang menentukan baik-buruknya sebuah penilaian kinerja polisi oleh (elemen) masyarakat adalah intensitas interaksi dengan polisi.

Maka, uraian Irjen. Pol. Basyir Barmawi di atas yang menyandarkan penilaian kinerja polisi pada persepsi masyarakat akan tergantung pada intensitas polisi melakukan pendekatan terhadap (elemen-elemen) masyarakat. Sekali lagi, disini polisi akan terjebak dalam sebuah permainan hegemoni (*hegemonical game*). Meskipun tentu saja terlibat dalam permainan ini penting, namun jika sepenuhnya bermain dalam 'kubangan' hege-

moni ini akan kehilangan arah kerja polisi yang substansial.

Konstruksi Konflik

Dari uraian di atas relasi polisi-masyarakat bukanlah relasi militer dan sederhana. Jaringan makna tentang tugas, peran dan cara kerja (prestasi) polisi tidak lepas dari dimensi hegemoni yang dimainkan lembaga kepolisian sebagai instrumentasi negara di satu sisi dan elemen-elemen masyarakat di sisi lain. Relasi konflik polisi-masyarakat muncul dari jaringan makna. Masih belum ada riset serius yang tersimpan di kepustakaan dalam persoalan ini (relasi polisi-masyarakat) di Indonesia. Padahal sangat penting, seperti logika uraian Kepala Devisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri di atas bahwa kinerja polisi sepenuhnya bersandar pada penelitian (persepsi) masyarakat. Oleh karena itu, absah pula secara metodologis menempatkan kemungkinan relasi konflik polisi-masyarakat dalam dimensi jaringan pemaknaan (persepsional).

Hampir empat puluh tahun yang lalu Blake, Mounon, dan Sloma⁷ melakukan riset terhadap

⁷ Lihat R.R Blake, J.S. Mounon dan R.L. Slouma. 1965, *The Union Management Intergroup Laboratory; Strategy for Resolving Intergroup Conflict*, dalam Kumarto dan Hariadi Kuswaryono (Peny, 1999).

kepolisian di Amerika berkenaan dengan tema besar hubungan polisi-masyarakat. Bagian terpenting dari riset ini menggali persepsi polisi yaitu bagaimana polisi memandang masyarakat, dan di sisi lain menggali persepsi masyarakat dalam memandang polisi.

Pada pertanyaan pertama, persepsi polisi terhadap masyarakat, polisi memandang bahwa warga masyarakat Amerika sesungguhnya warga yang patuh hukum tetapi tidak faham tentang hukum dan tugas polisi. Blake dan kawan-kawan menggunakan variabel kelas dalam penelitian ini. Terhadap warga masyarakat kelas atas polisi memandangnya sebagai ambivalen. Warga kelas atas ini menurut polisi mendukung tugas-tugas kepolisian tetapi bersamaan dengan itu merasa mempunyai privilege atas hukum, jadi mereka (seringkali) menggunakan otoritasnya (dan uang) untuk menghindari jeratan hukum. Masyarakat kelas menengah, menurut polisi paling jarang melakukan kontak dengan kepolisian dan warga yang taat hukum, kontak terjadi hanya pada persoalan-persoalan kecil sekitar pelanggaran lalu lintas. Terhadap warga kelas bawah polisi memandang sebagai warga paling tidak kooperatif dan sering betentengan dengan hukum. Dalam pandangan

polisi, warga kelas bawah ini mempunyai persepsi yang berbeda dalam memandang nilai dan kehidupan bernegara.

Agak rancu, hemat saya, penelitian yang dilakukan oleh Blake dan kawan-kawan ini dalam meletakkan variabel independen. Di lain tempat ia memandang penting ras, bukan kelas sosial. Orang kulit hitam Negro dari hasil temuannya adalah orang yang patuh kepada hukum, kooperatif dengan kepolisian, tidak cenderung melakukan kekerasan, memiliki moral yang tinggi. Sementara orang kulit hitam tipe "Niger" sebaliknya, *immorial*, tidak jujur, cenderung berbuat kejahatan dan kekerasan. Keracunan ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan, apakah Negri dan Niger adalah sebuah kelas? Dimana pula posisi orang kulit berwarna (orang asia)? Namun barangkali Blake dan kawan-kawan pilihan variabel independen tidak begitu penting untuk diketakkan secara ketat, meski barangkali dari (variabel) kelas sosial, karena sekadar untuk memahami tren persepsi polisi terhadap masyarakat.

Pada sisi lain, bagaimana masyarakat memandang polisi? Umumnya masyarakat memandang polisi, menurut temuan Blake, sebagai orang-orang yang bertindak

dan menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun tidak sepenuhnya seragam, tergantung pada ras, kelompok usia, kelas sosial.

Sejauh ini riset yang dilakukan Blake dan kawan – kawan menampilkan fenomena hubungan konfliktual antara polisi dengan masyarakat. Persoalannya, bagaimana konstruksi relasi konflik itu hadir? Persoalan utama terletak pada kesenjangan idealitas peran polisi dengan realitas yang dimainkannya. Polisi adalah ‘makhluk yang dirancang professional’, ia merupakan segmentasi otonom yang terlahir atas hadirnya realitas negara. Artinya, di Amerika polisi yang berasal dari Negro bukanlah polisi yang mempunyai jiwa Negro (mempunyai sentimen Negro) tetapi ia adalah seorang polisi yang steril dari asal – usul primordial. Polisi adalah elemen sosial baru sepanjang sejarah peradaban manusia, keberadaannya jauh setelah sejarah perkumpulan primordial. Memang kehadirannya bersama dengan munculnya negara, sekaligus menjadi instrumen negara tapi secara fungsional ia mempunyai jarak dengan negara (kekuasaan).

Maka potensi konflik dalam relasi polisi – masyarakat ketika polisi tidak mampu melepaskan dari ikatan – ikatan primordialnya. Tapi ini adalah kesimpulan sementara yang sangat sederhana, persoalannya bisa menjadi sangat rumit di lapangan. Kondisi dimana struktur primordial telah mencair tidak lagi dipandang perlu sebagai faktor solidaritas yang menarik, struktur organisasi menggantikan bentuk solidaritas lama. Pada kondisi ini polisi bisa sangat mungkin memunculkan semacam solidaritas korp, *korpisme*.

Mencairnya primordialisme secara pasif, di Indonesia terdapat kecenderungan mengundang korpisme. Korpisme, hemat saya, yang paling menonjol terjadi adalah dikalangan polisi. Meskipun, tentu saja kecenderungan korpisme ini juga terjadi pada komunitas profesi lain, seperti pada guru, dosen, dokter, petani, bankir, dan lain-lain. Korpisme menjadi realitas yang tidak terhindarkan dalam struktur masyarakat organil yang sudah terdefernsiasasi sedemikian rupa⁸, ia dipandang sebagai keniscayaan. Korpisme dalam konteks unu merujuk pada solidaritas korp yang bisa begitu mudah mengalahkan

⁸ Proposisi Durkhemian.

etika sosial universal. Salah atau benar adalah belakangan, yang penting solidaritas kelompok.

Persoalannya, bagaimana struktur diferensial yang (saling) fungsional itu melahirkan struktur konflik? Pergeseran dari fungsional ke konflik tampaknya harus pula menggeser paradigma dalam memahami realitas lantaran menurut struktural fungsionalis term konflik tidak dikenal, yang ada adalah sebuah kondisi "disfungsi". Kondisi disfungsi yang terus menerus akan mengamputasi diri atas lembaga tersebut. Di sinilah persoalan keberlakuan teori fungsionalis struktural ini (Merton), kita dapat mempertanyakan sampai kapan misalnya polisi mengamputasi diri? Untuk ini, barangkali khusus untuk lembaga kepolisian, ia harus ada secara permanent, maka klausul mengamputasi digeser menjadi "adaptasi".

Terminalogi adaptasi dikembangkan Talcot Parson, seorang

struktural fungsional¹⁰. menurutnya (proses) adaptasi dibutuhkan dalam rangka kelangsungan sebuah sub sistem. Dalam konteks kepolisian perubahan yang terjadi bukan dalam rangka 'kelangsungan hidup' seperti preskripsi Parson itu, karena kepolisian seburuk apapun harus eksis dalam masyarakat negara. Maka "adaptasi" ini harus dibaca bukan sebagai kesadaran internal untuk kelangsungan hidup lembaga ini tetapi sebagai sebuah hasil desakan atau dominasi kuat dari sub-sistem kemasyarakatan yang lain. Pada konteks inilah tulisan ini menempatkan diri sejak awal; bahwa yang terjadi bukanlah "konsensus" seperti adagium yang dikembangkan kaum struktural fungsional tetapi "konflik".

Dari semua profesi di masyarakat yang membedakannya dengan polisi adalah posisi polisi yang 'berhimpit' antara dua dunia: dunia sipil dan dunia militer. Posisi ini

⁹. Proposisi Robert K. Merton.

¹⁰. Konsep ini (adaptasi) sangat berpengaruh dalam rekayasa sosial dan merancang perubahan sosial, utamanya pada tahun 50-an karena konsep ini dipandang krusial dalam teori sistem. Pada hampir semua negara yang baru merdeka kala itu mengeksplorasi teori ini dalam merancang perubahan sosialnya bahkan juga arah perubahan. Di Indonesia dalam eksplorasinya menemukan kata kuncinya pada "Pembangunan" - duplikasi dari 'filsafat progres'. Para teoretikus pembangunan tidak melupakan nama J.J Rostow dengan teori 5 tahapnya dan Smelser dengan N-Achnya. Jadi, nyaris pada konsidi intelektual seperti ini hampir tidak ada ruang mendiskusikan teori perubahan sosial alternatif (misalnya yang berangkat dari paradigma konflik).

mengiringi polisi pada wilayah psikologis keterpencilan. *Karl Marx* menyebutnya sebagai *aleansi*. Namun bukan sepenuhnya relevan konsep Marx ini, karena polisi masih bisa melakukan konsolidasi dalam membangun nilai – nilainya sendiri. Bersamaan dengan proses membangun nilai ini sesungguhnya sedang mengartikulasikan psikologi keterpencilannya dengan membangun psikologi “orang luar” (out-sider) dan “orang dalam (in-sider). Proses ini meminjam Kimball Young¹¹, adalah sebuah proses membangun kohefitas kedalam (solidaritas internal) dengan cara mengkonstruksi definisi realitas ‘ancaman’ dari luar. Posisi yang “diluar sana” adalah dunia obyek pekerjaannya—dipandang sebagai ‘tantangan dan ancaman’, “di dalam sini” tempatnya berlindung.

Beban Sejarah dan Struktur Konflik Hari Ini

Di atas digambarkan bagaimana konflik struktural antara polisi-masyarakat itu dikonstruksikan.

Diluar persoalan struktur konflik tersebut aspek sejarah turut berpengaruh terhadap posisi struktur yang terbangun hari ini. Sejarah dapat pula diletakkan sebagai perspektif, artinya aspek sejarah sangat penting dalam memahami realitas hari ini. Hampir telah menjadi *credo* teori-teori ilmu sosial umumnya bahwa realitas hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin¹². Polisi kita sesungguhnya lahir dalam rangka mengawal kekuasaan, bukan hadir melalui sebagai sebuah komitmen empiric kebutuhan masyarakat. Di era Mataram, misalnya raja membangun barikade pengamanan dalam momen yang melibatkan publik, pengamanan ini sepenuhnya dibentuk oleh raja dan melindungi sepenuhnya untuk raja saja.

Momen sejarah yang sangat penting bagi kepolisian adalah pada era Majapahit¹³. Meskipun era ini masih belum mengenal kedaulatan rakyat namun telah ada kesadaran orang bahwa raja adalah orang manusia biasa, oleh karena itu raja

¹¹ Kimball Young, 1942. *Sociology, A Study of Society and Culture*, American Book Company, New York, Hal. 59-82, bahwa tingkat kohesivitas dapat muncul dengan cara menciptakan musuh di luar.

¹² Kecuali sedikit pada kalangan post strukturalis yang memahami adanya diskontinuitas sejarah, hemat saya tidak representatif untuk diperhitungkan.

¹³ Sejarah lahirnya Kepolisian di Indonesia Sejak Majapahit hingga Orde Baru, Lihat misalnya Harsa W. Bahtiar. 1994. *Ilmu Kepolisian; Suatu Cabang Pengetahuan yang Baru*, Grasindo (diterbitkan atas kerjasama PTIK dan Penerbit Gramedia), Jakarta. Hal. 37-65.

dapat ditentang, digulingkan dan didukung. Pada waktu Majapahit dibawah kekuasaan raja Jayanegara terjadi perebutan kekuasaan di bawah dikomando pimpinan Kuti tahun 1319, perebutan kekuasaan ini tidak berhasil karena pasukan Bhayangkara tidak dapat dipengaruhi intrik-intrik politik. Pasukan pengawal Bhayangkara dapat menjaga kekuasaan raja dengan baik. Disini jelas bahwa Bhayangkara adalah milik aktor negara. Begitu pula pada era Hindia Belanda, mendirikan kepolisian kolonial untuk tujuan mengontrol tanah jajahan yang cukup luas. Keamanan dan ketertiban masyarakat dibutuhkan dalam rangka kelangkaan proses produksi. Pada "musim" gerakan kebangsaan bersemi, tahun 1920 Belanda mendirikan dinas intelejen politik.

Bagaimana penjelasannya sejarah semacam ini dipandang sebagai sebuah persoalan yang menjadi kendala dalam membangun relasi harmoni polisi – masyarakat pada hari ini? Bagaimana meletakkan sejarah semacam ini dalam konstelasi relasi polisi – masyarakat pada hari ini?

Untuk mengurai penjelasan pertanyaan ini perlu menilik realitas

di tempat yang berbeda sebagai sebuah perbandingan, Amerika misalnya. Sejarah hadirnya polisi di Amerika adalah hasil inisiatif warga untuk menjaga kontrak sosial yang mereka buat sendiri. Jadi keberadaan polisi di Amerika mendahului keberadaan negara. Negara hadir dalam kesepakatan politik, sementara polisi hadir – sherif – dalang rangka kesepakatan atau proses hegemonisasi sipil pada wilayah sipil sendiri. Perbedaan kelahiran polisi di Amerika dengan di Indonesia, di Amerika polisi lahir sebagai akibat proses sosial (*civilian process*)¹⁴ sementara di Indonesia polisi lahir sebagai konsekuensi dari hadirnya kekuasaan (*power process*).

Polisi yang lahir sebagai produk *civilian process* adalah bahwa masyarakat mengakui adanya kelompok kuat (sherif – kasus Amerika) di antara kelompok – kelompok yang ada dalam masyarakat. Pengakuan ini kemudian diartikulasikan dalam kontrak dan consensus warga. Sebuah kelompok yang menghindari serangan kelompok lain bisa minta perlindungan pada kelompok kuat ini dengan cara memberikan upeti. Polisi sebagai produk kekuatan (*power proses*) adalah pengakuan

¹⁴. Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, hal. 35.

kekuatan suatu kelompok tidak membutuhkan consensus dan kontrak antar warga atau antar kelompok, walaupun jelas juga kelompok kuat ini bukan hidup dari upeti seperti pada kasus Sharif tadi, tetapi hidup sebagai konsekwensi dari adanya kelompok kekuasaan.

Jadi harmonisasi, sebagai upaya meletakkan polisi pada posisi yang dapat diterima masyarakat di Indonesia terdapat beban sejarah yang panjang. Kisah polisi – masyarakat adalah sejarah konflik, sejarah dominasi. Kisah ini sesungguhnya bukan monopoli Indonesia, tetapi di kebanyakan negara-negara Timur mempunyai kesamaan. Pencitraan (konflik) ini telah terpatri ratusan tahun.

Terdapat masalah besar bagi Indonesia (dan kebanyakan negara berkembang) kiprah polisi dalam struktur konflik ini, yaitu dalam eksperimennya menuju negara modern yang demokratis, posisi polisi dalam konstelasi kekuasaan memaksa polisi hadir dipapan catur politik. Ia sulit netral, menjadi bagian dari kekuatan, kalau ditilik dari sejarah mendapat kesan bahwa posisi ini telah menjadi karakter polisi. Pemisahan polisi dari TNI memang lompatan yang cukup maju, namun turbelensi politik seringkali mengundang hadirnya polisi pada papan catur kekuasaan.

Undangan itu denga atau tanpa issue menyatukan Polri kembali ke tubuh TNI, misalnya pada era Presiden KH. Abdurraman Wahid ketika Polri dipimpin Bimantoro.

Belakangan ini, tanggal 28 April 2004 demokrasi Thailand misalnya terkoyak karena perilaku polisi yang berlebihan menghadapi kelompok militan di bagian selatan negara ini. *Harian Kompas*, 2 Mei 2004 melaporkan korban tewas 108 dari kalangan militan dan tiga dari personel polisi. Beberapa harian negara ini mengutuk tindakan polisi yang berlebihan ini. dari laporan *Harian Kompas* bahwa Letnan Jendral Pol. Proong Bhunpandung telah mengetahui sebelumnya akan adanya rencana serangan dari kelompok militan, polisi menyambut serangan ini dengan persenjataan yang jauh lengkap. Insiden pembantaianpun tidak terelakan. Yang menarik adalah bagaimana CB (Cara Bertindak) seperti ini – pembantaian – muncul. Dari sisi ini barangkali polisi Indonesia selangkah lebih maju, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar telah mengeluarkan CB yang berbeda pada kasus penyerangan warga masyarakat atas pos polisi. Bahwa seandainya polisi menghindari serangan warga dengan meninggalkan pos untuk menyelamatkan diri andaikan warga masyarakat menyerang pos polisi.

Namun pada contoh kasus yang sama di negara yang berbeda

tersebut mempunyai struktur konflik yang berbeda sehingga dapat difahami CB yang keluar juga berbeda. CB yang dikeluarkan Kapolri barangkali hanya berlaku dalam asumsi bahwa lawan yang dihadapi polisi bukanlah jenis kelompok separatis. Sulit bagi polisi sesungguhnya menutup mata terhadap pola-pola kerusuhan sebagai bagian dari struktur konflik, oleh karenanya berpengaruh pada pilihan atas tindakan pengamanan. Otoritas polisi dalam memilih menggunakan CB terhadap realitas kerusuhan (deskresi) seringkali melahirkan implikasi jarak polisi – masyarakat semakin jauh. Penerapan CB yang berbeda-beda terhadap pengamanan kampanye atas partai-partai politik dapat memunculkan rasa diskriminasi polisi atas partai tertentu.

Selain implikasi dari sebuah pilihan strategi pengamanan, kelemahan personil polisi semata juga mempunyai akibat meluasnya struktur konflik antara polisi – masyarakat. Ini terjadi pada kerusuhan Ambon yang terakhir ini, dipenghujung bulan April 2004. banyak analis di harian media massa bahwa kerusuhan ini disebabkan lalainya polisi dalam menjaga Alex Manuputy, pemimpin RMS. Analis ini menginginkan RMS ditindak tegas dan polisi tidak pernah melakukan. CB yang telah dikeluarkan dengan mengulimatam menembak ditempat terhadap

orang yang mengibarkan bendera RMS pada kenyataannya tidak juga dilakukan. Sisi yang dapat melibatkan polisi dalam konflik ini terletak pada struktur konflik dan struktur argument media massa, argument untuk menindak tegas RMS tadi mengesankan berasal dari kubu kelompok islam.

Terdapat opini masyarakat yang dibangun secara deduktif, mungkin dipengaruhi ideologi agama sangat berpengaruh terhadap struktur relasinya dengan polisi. Realitas ini seringkali terjadi pada kasus-kasus yang menyentuh emosi keagamaan, pada satu sisi. Disisi lain polisi cenderung menghindari keterlibatan emosional semacam itu. Begitupun dalam pandangan masyarakat bahwa polisi tidak mau mengerti terhadap emosi yang berangkat dari ideology agama. Terhadap kasus Abubakar Ba'asyir, misalnya dalam banyak kesempatan diskusi di televise secara langsung antara polisi dengan masyarakat, hampir seluruh komentar yang masuk sulit memahami logika polisi dalam melakukan pengkapan ulang. Dan hampir seluruh komentar masyarakat menempatkan polisi sebagai "boneka" Amerika untuk menangkap Abubakar Ba'asyir. Pemikiran masyarakat ini sebuah gejala dediktif, kritis terhadap polisi

dengan menganalisa perilaku polisi itu dalam konspirasi kekuasaan yang lebih luas. Cara masyarakat memahami polisi seperti ini tidak lepas dari pengaruh struktur sejarah.

Penutup

Tidak mempunyai dasar yang kuat melihat kelemahan polisi sebagai persoalan internal polisi, begitu pula meletakkan pada rasio personil dengan jumlah penduduk. Pendapat seperti ini, misalnya, pernah dikemukakan Gus Dur sewaktu menjabat Presiden. Mengikuti Anton Tabah kelemahan polisi selama 4 dekade disebabkan oleh policy politis (*causing factor*), sementara kurangnya personil men-

jadi faktor sekunder saja (*contributing factor*). Preskripsi yang dipakai Anton Tabah ini dalam konteks teori yang dikembangkan diatas (pada bagian "Konstruksi Konflik") bahwa sesungguhnya bukan term adaptasi yang tepat untuk menjelaskan perubahan di sana-sini tentang Polri, baik perubahan internalnya maupun relasinya dengan kekuasaan. Tetapi ada kekuatan lain "di luar sana" yang memaksa Polri berubah. Lagi-lagi ini adalah persoalan konstelasi kekuasaan sebagai konflik yang terstruktur dan beban sejarah yang panjang. Mengangkat kelemahan polisi sebagai wacana tidak produktif jika tanpa mengaitkan dengan konteks struktur yang lebih luas dan kontek sejarah.

Daftar Pustaka

- Bahtiar, Harsa, W., *Ilmu Kepolisian: Suatu Cabang Pengetahuan yang Baru*. Jakarta: Grasindo, 1994.
- Berger Peter L., *Humanisme Sosiologi*, Terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985.
- Collins, Randal and Michael Makowsky., *The Discovery of Society*. New York: Third Edition, Random House, 1984.
- Fay, Brian., *Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer*. Terj. M. Muhith. Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Giddens, Anthony dan David Held., *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, Terj. Ali Mandan, et. all., Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (Peny.), *The Urban Policemen in Transition; Psychological and So-*

¹⁵ Anton Tabah. 2002. *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, hal. 35.

- ciological Review*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Markoff, John., *Gelombang Demokrasi Dunia*, Terj. Ari Setyaningrum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhammad, Farouk., *Menuju Reformasi Polisi*. Jakarta: PTIK Press, 2003.
- O'Donnell, Guillermo, et. all (Edt), *Transisi Menuju Demokrasi; Tinjauan Berbagai Perspektif*. Terj. Ade Armando dan Widjarnarko. Jakarta:LP3ES, 1993.
- Ritzer, George., *Teori Sosial Post-modern*, Terj. Muhammad Taufik. Jakarta: Wacana, 2003.
- Simon, Roger., *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*, Terj. Kamdani dan Iman Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 1999.
- Stanley (Edt.), *Keamanan, Demokrasi dan Pemilu 2004*. Jakarta: Propatria, 2004.
- Tabah, Anton., *Membangun Polisi yang Kual*. Jakarta: Mitra Hardhasuma, 2002.
- Young, Kimball., *Sociology, A Study of Society and Culture*. New York: American Book Company, 1942.



RESENSI BUKU

- Judul Buku : Kerusakan Sosial di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas
- Penulis : Indria Samego, dkk.
- Penerbit : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Halaman/Cetak : 251/Agustus 2001
- Peresensi : Drs. Agung Abdul Rasul, M.M.*

Buku ini berawal dari hasil studi yang dilakukan oleh Tim Penulis (Indria Samego, Awani Irewati, Erlangga Masdiana, Heru Cahyono, Moch. Nurhasim, Riza Sihbudi, Sri Yanuarti) berkat kerjasama kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sebuah studi yang berupaya untuk memahami anatomi kerusakan di tiga daerah yaitu Mataram, Kupang, dan Sambas.

Konflik sosial yang pernah terjadi di tiga daerah tersebut dapat memberikan gambaran mengenai pola transformasi pemetaan konflik sosial mulai dari pola pribumi *vis a vis* non pribumi, gesekan antar-penduduk asli dan pendatang, konflik Islam dan Kristen hingga keterlibatan faktor eksternal (Provokator, konflik elite, pengaruh media massa dan

media informasi lainnya, maupun pihak-pihak luar yang berkepentingan untuk mengancam kondisi sosial, politik dan ekonomi di tingkat nasional maupun lokal).

Tim Penulis buku ini menampilkannya model analisis yang relatif kompleks khususnya dalam perspektif mencari solusi konflik sosial yang terjadi. Betapa benar mata rantai yang melingkupi kerusakan sosial mulai dari sumber masalah, akselerator dan faktor pemicu/penyulut ditelaah secara simultan, dengan dukungan data-data yang memiliki validitas yang relatif tinggi.

Hal ini dikatakan mengingat proses eksplorasi data di jembatani oleh *dept interview guide* secara *proposive* (dengan pertimbangan agama, ras, suku dan antargolongan di tiga lokasi penelitian) terhadap masyarakat, para pelaku dan korban, pemuka suku, adat dan agama, kalangan intelektual/

* Redaktur

kampus, kalangan LSM, pejabat pemerintah sipil, TNI dan polisi, anggota DPRD I dan II, anggota partai politik, tokoh agama, tokoh partai dan pengusaha.

Karya ini sangat mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi POLRI dalam rangka mengatasi konflik dan kerusuhan sosial di tanah air, setidaknya dalam upaya menetralsir pengaruh akselerator dan faktor pemicu/penyulut terhadap sumber masalah konflik sosial sehingga dampaknya terhadap kerusuhan sosial dapat diminimalisir.

A. Konflik dan Gerakan Sosial-Massa

Masyarakat dalam pandangan *Ralf Dahrendorf* dikelompokkan pada tiga lapisan meliputi lapisan atas, bawah dan lapisan menengah yang menjadi perantara dari kedua lapisan tersebut. Masyarakat kelas atas adalah mereka yang mempertahankan monopoli pemilikan tanah, masyarakat kelas menengah adalah yang memiliki sedikit atau tidak memiliki tanah dan kapital, dan kelas bawah adalah pekerja yang sama sekali tidak memiliki tanah dan kapital. Demikian menurut *David Lee* dan *Howard Newby* (1983).

Keberadaan masyarakat dalam lapisan-lapisan itu mungkin akan

saling berbenturan jika kelompok pemilik modal melakukan eksploitasi terhadap kelompok kelas bawah. Kondisi sosial yang tidak seimbang tersebut akan terus bertahan karena pada dasarnya pemilik modal mampu mendapatkan dukungan dari kebijakan negara yang dikuasainya baik dukungan hukum maupun jaringan birokrasi pemerintah. Sisi lain yang memungkinkan konflik antar-kelas itu terjadi adalah peningkatan kesadaran ideologi khususnya pada kelas bawah melalui proses pendidikan. Ideologi yang dimiliki oleh kelas bawah tidak hanya menganut ideologinya sendiri, namun secara tidak sadar ideologi itu telah terbangun oleh ideologi kelas dominan.

Berbeda dengan *Dahrendorf*, yang menyoroti pengelompokkan masyarakat dari aspek ekonomi, di mana *Talcott Parsons* menekankan nilai dan budaya sebagai *key determinan factors* terhadap perilaku sosial suatu kelompok. *Parsons* memandang bahwa setiap orang atau kelompok akan dihadapkan kepada variabel pola yang dikotomis, yaitu (1) afektivitas-netralitas, (2) perluasan-kekhususan, (3) universalisme-partikularisme, (4) prestasi-askripsi, (5) pribadi-kolektivitas. Dikotomi-dikotomi tersebut sebagai orientasi

nilai yang membatasi kaidah-kaidah suatu sistem sosial dan proses pengambilan keputusan.

Manakala aspek ekonomi, nilai dan budaya tersebut sedemikian rupa menyekat masyarakat ke dalam pengkotakan-pengkotakan, maka konflik antar-kelompok seringkali timbul karena adanya sejarah persaingan, prasangka dan rasa benci, baik itu sifatnya pribadi, politis maupun ideologis yang melatarbelakanginya.

Bangunan konflik bisa pula diciptakan oleh kelompok luar maupun hubungan sosial yang tidak berjalan harmonis. *Sarlito Wirawan Sarwono (1999)*, mengungkapkan bahwa penguasa kolonial Belgia telah membelah masyarakat Ruanda menjadi kelompok Tutsi dan Hutu dengan memiliki *privilege* (keistimewaan) yang berbeda. Sepaham dengan Sarlito, tim penyusun buku ini memandang bahwa konflik di Indonesia dilakukan oleh berbagai pihak yang ingin menutupi kesalahan-kesalahan tindakan politik di masa lalu. dengan adanya konflik diharapkan akan tercipta instabilitas kekuasaan dan pemerintahan sah. Indikatornya adalah konflik terjadi secara rapi dan simultan, dan para organisasinya dipastikan adalah yang memiliki dana yang kuat, jaringan yang terorganisasi dan mengenal

kelemahan-kelemahan hukum dan kemampuan jumlah aparat.

Konflik sosial juga bertautan dengan "kekerasan" sebagai bagian dari ideologi, gaya hidup dan budaya pada sebagian kalangan masyarakat. *Albert K. Cohen (1970)* menyebutnya dengan sub-budaya kekerasan, di mana setiap anggota masyarakat meraih status sosial dalam kelompok berdasarkan perolehan prestasi kekerasan yang dihargai oleh kelompoknya. Sementara itu *Shaw dan McKay (1970)* menganggap kekerasan itu diwariskan dari generasi tua kepada generasi muda. Mereka yang tersosialisasi di dalam kelompok generasi tua yang terbiasa melakukan kekerasan akan melakukan kekerasan karena mereka mencontoh apa yang dilakukan generasi tuanya. Konflik yang menggunakan kekerasan adalah suatu realitas yang tidak membutuhkan pembenaran moral, karena kekerasan memiliki kualitas pembaruan, membebaskan manusia untuk mengikuti ketentuan tidak rasional dari sifat bawaannya sendiri. Demikian menurut *Pareto dan Mosca (1965)*.

Berkenaan dengan keterkaitan antara konflik dengan gerakan massa, studi *Gamson* terhadap 53 kelompok pembangkang yang muncul di masyarakat Amerika

antar tahun 1800 s/d 1945 berkesimpulan bahwa kekerasan itu lahir dari keyakinan, kekuatan dan ketidaksabaran para pelakunya menunggu langkah perubahan, meskipun pada saat yang sama dapat menimbulkan ketakutan atau ancaman. Sementara itu menurut **Robert H. Lauer (1989)**, konflik sangat penting bagi penentuan arah gerakan, dan solidaritas sangat penting dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Solidaritas akan makin terjamin jika kekerasan itu terjadi.

Mengidentifikasi masalah kekerasan, **Tilly et. all (1975)** menyatakan bahwa kekerasan kolektif melambangkan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan, dan bukan akibat dari kebobrokan sosial, kemelaratan material atau tindakan tidak rasional. Kekerasan kolektif akan membangkitkan suatu rasa takut terhadap kelompok lain yang dijadikan sebagai sarana dan juga dijadikan sebagai proses kristalisasi komitmen di kalangan anggota. Ciri dari gerakan kolektif adalah memiliki efek penularan (*contagion*) yang sangat cepat, seolah-olah para anggota yang melakukan gerakan tersebut dihipnotis (*suggestability*); para anggota di dalamnya seakan-akan hilang identitas dirinya, yang muncul adalah identitas kelompok (*anonymity*). Demikian menurut **Gustave Le Bon (1966)**.

Gerakan sosial massa tersebut menurut **Neil J. Smelser, et. all (1974)** ditentukan oleh beberapa faktor yaitu : (1) daya dukung struktural, dalam arti gerakan sosial-massa akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi melakukan gerakan masa secara spontan dan berkelanjutan, (2) adanya tekanan-tekanan struktural (*structural strain*) akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi yang menyengsarakan, (3) distribusi informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas, sehingga menimbulkan kegelisahan secara kolektif atas situasi yang tidak menguntungkan, (4) emosi yang tidak terkendali karena ada rumor atau isu-isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan, (5) upaya mobilisasi orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang direncanakan.

Indikator teoretis untuk mengantisipasi konflik diperlukan pengorganisasian kelompok-kelompok sosial secara baik sehingga mampu membangun sebuah mekanisme kontrol terhadap kecenderungan kelompok (**Ralf Dahrendorf**), dibutuhkan pemimpin yang kharismatik dalam masyarakat Chaos

(Max Weber), dan memerlukan hubungan dan komunikasi di antara kelompok-kelompok sosial secara terbuka dengan menekan label-label negatif di antara kelompok yang berinteraksi (Fisher & Ury). Sedangkan Jack Rothman menyarankan beberapa tindakan meliputi : (1) tindakan koersif (paksaan), (2) memberikan insentif (penghargaan terhadap komunitas yang berhasil menjaga ketertiban dan keharmonisan), (3) tindakan persuasif terhadap ketidakpuasan yang dihadapi masyarakat atas realitas sosial, politik dan ekonomi,

(4) tindakan normatif (membangun persepsi dan keyakinan masyarakat akan sistem sosial yang akan dicapai).

B. Sumber Masalah Kerusuhan Sosial

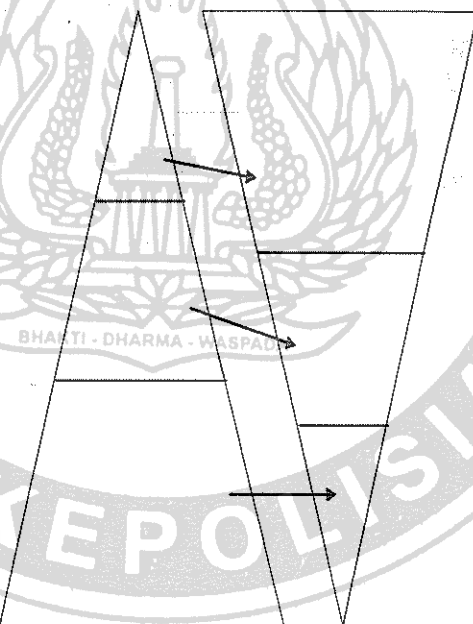
Berkenaan dengan Sumber masalah kerusuhan sosial di Kupang NTT, tim penyusun buku ini secara umum mengklasifikasinya dalam 2 kategori meliputi :

(1) Pergeseran ekonomi lokal kepada pendatang. Kenyataan tersebut secara skematis ditampikan sebagai berikut :

- * Kelompok pendatang *upper class* (etnis Tionghoa, Bugis, Makassar) (sektor ikan, kayu).
- * Para penguasa politik dan bangsawan lokal serta para pengusaha.
- * Kelompok pendatang *middle class* (sebagian Jawa dan Padang).
- * Kelompok penduduk asli (sebagian yang umumnya jadi pegawai negeri sipil).

Masyarakat Umum (*Lower Class*)

- * Petani dan nelayan kecil.
- * Tukang, buruh, maupun angkatan kerja tak kentara seperti mahasiswa.
- * Sebagian para pendatang yang bergerak di sektor nelayan kecil/buruh, bahkan pedagang asongan.



Jumlah Penduduk Penguasaan Ekonomi

(2) Kesenjangan, kecemburuan ekonomi dan masalah pengangguran penduduk asli.

Sekitar 2/3 lebih penduduk NTT umumnya dan Kodya Kupang khususnya tergolong penduduk miskin alamiah yaitu

kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alam (geografis). Kondisi ini diperparah lagi oleh model berkembangnya kemiskinan struktural di masa orde baru karena penduduk kecil, rakyat umum dimarginalkan dalam proses ekonomi di daerah.

Sementara itu para pendatang memiliki gaya hidup yang mengandung kecemburuansosial yang tinggi. Rumah-rumah para pendatang yang mentereng dijadikan sebagai simbol permusuhan kelompok pribumi yang tak mampu meraih gaya hidup yang sama. Di lain pihak sekitar 5127 pencari kerja (data statistik 1998) harus berkompetisi mendapat lowongan kerja yang hanya 702 orang, sehingga rasio pengangguran yang tinggi dibandingkan rasio pekerja tidak bida dihindari.

Kemudian sumber masalah konflik sosial di Mataram NTB antara lain diidentifikasi sebagai berikut :

Pertama, faktor kesenjangan sosial ekonomi, khususnya antara warga pribumi dan non-pribumi (Cina) yang melebar. Sementara itu, dengan kekuatan materi/uang kelompok non pribumi khususnya kaum pria seringkali melakukan kawin paksa (dengan memacari dan menghamili terlebih dahulu)

dengan para wanita pribumi (etnis Sasak). Secara kuantitas kelompok non-pribumi adalah minoritas namun mayoritas dalam pendapatan hasil-hasil ekonomi. Sentra bisnis Cakranegara merupakan tempat bisnis non pribumi yang terbesar. *Kedua*, faktor hubungan antar-umat beragama (khususnya Islam dan non Islam) yang tidak jarang menimbulkan ketegangan yang disebabkan oleh pembangunan rumah-rumah ibadah yang dipandang kurang proporsional. Misalnya pendirian gereja di lokasi yang mayoritas penduduknya muslim, gereja yang jemaatnya berasal dari luar daerah, dan adanya panti-panti asuhan milik kaum nasrani yang merekrut anak-anak muslim. *Ketiga*, tersambatnya jalur komunikasi antara masyarakat dengan pemimpin (baik formal maupun informal). Fungsi DPRD Tingkat I dan Tingkat II melemah dan rendahnya dialog antara para tokoh agama maupun dengan masyarakat juga menjadi sebab munculnya kekecewaan masyarakat yang bersifat kekerasan. *Keempat*, pola pemukiman atas dasar agama, khususnya antar-warga Hindu-Bali dengan Muslim-Sasak, dimana pemukiman warga Hindu lebih bersifat tertutup. Sumber ini secara langsung tidak menjadi

sumber munculnya kerusuhan 17 Januari 2000, tetapi kemungkinan akan menjadi potensi konflik di masa depan.

Sedangkan sumber masalah kerusuhan Sambas Kalimantan Barat tahun 1999 dan 25 Oktober 2000 antara lain meliputi :

1. Profil etnitas dan interaksi sosial antar-etnik

Komposisi masyarakat Kalimantan Barat terdiri dari 41% Etnis Dayak, 39,7% Etnis Melayu, 3% Etnis Cina, 5% Etnis Bugis dan 3% Etnis Jawa serta 2,7% Etnis Madura. Etnis Dayak memiliki sifat peramah, suka bergaul dengan siapa saja dan tidak senang mendengar kata-kata kasar. *Janji* dianggap sebagai hutang dan berbohong dipandang sebagai sifat yang sangat hina. Mereka sangat patuh kepada Ketua Adat (Kepala Suku) dan pada masa lalu mengenal Lembaga *Mangayau* dan *Mangkok Merah*. *Mengayau* berarti mencari atau memotong kepala manusia dengan motif balas dendam. *Mangkok Merah* merupakan sarana komunikasi untuk menjalin solidaritas, khususnya yang berkaitan dengan peperangan.

Sementara itu etnis Dayak yang memeluk Islam dengan sendirinya melebur diri ke dalam suku nelayan. Suku ini memiliki sifat pengalah, taat terhadap agama dan adat, pemalu, santun budi bahasanya, tak gampang dihasut dan tidak mudah marah, memiliki solidaritas tinggi dan pekerja keras. Begitu pula dengan etnis Cina, dimana mereka dikenal sebagai petani yang ulet dan rajin.

Etnis Madura dengan rata-rata tingkat pendidikan yang rendah, bahkan tidak sedikit yang buta huruf mempunyai lembaga budaya *Carok* yang bertalian dengan harga diri. Membalas kematian orang tua atau saudara yang dibunuh orang lain adalah kewajiban. Hal ini berkaitan erat dengan budaya *toodus* (malu). Solidaritas kelompok Madura juga kuat, khususnya dalam pengelompokan perumahan yang disebut *tanean lajang*, yang menjadikan satu rumah dapat ditinggali satu turunan.

Etnis lainnya seperti etnis Bugis, Jawa, Arab, Batak dan Minang berhasil mengintegrasikan diri dalam tatanan struktur sistem sosial Melayu. Kelen-

turan budaya Jawa membuat mereka mudah beradaptasi termasuk dalam soal agama. Demikian pula dengan etnis Batak, dimana relatif mudah beradaptasi dengan lingkungan budaya Dayak karena kesamaan agama.

2. Sejarah Pertikaian Antar-etnik

Pertikaian antar-etnik di wilayah ini didominasi oleh pertikaian antara suku Madura melawan suku Dayak. Hanya pada tahun 1960 pertikaian melibatkan etnik Cina dan tahun 1999 melibatkan etnik Melayu. Kebiasaan membawa senjata bagi orang-orang Madura, khususnya pada kelas bawah, dimana bagi mereka yang tidak membawa senjata (pisau, todik, clurit dan pedang) dianggap jagoan dan sangat berani sehingga perlu "dicoba". Menurut kepercayaan orang Madura, pisau berarti pengganti sebuah "tulang rusuk labi-labi sebelah kiri yang hilang, sehingga pisau bagi laki-laki Madura pendatang di daerah ini adalah sebagai "isteri pertama".

Sementara bagi orang-orang Melayu dan Dayak, merasa risih dan tidak terbiasa membawa senjata tajam di tempat-

tempat selain di ladang atau kebun, dan bagi mereka tidak membawa senjata tajam bukan berarti menganggap diri jagoan.

Perbedaan pandangan dari segi budaya semacam ini tampak menjadi benih ketidakharmonisan dalam hubungan sosial antara mereka dengan penduduk setempat. Perbedaan tersebut juga diperuncing dengan pola hubungan etnik yang mendasari pembentukan *stereotype* antar-etnik.

3. Hubungan dan Prasangka Sosial antar-Etnik

Orang-orang Madura (terutama dari Sampang dan Bangkalan) menganggap Kalimantan Barat pada umumnya dan Sambas pada khususnya sebagai milik Tuhan atau *hinterland* dari Madura. Mereka tetap menggunakan bahasa Madura dan berbagai adat istiadat serta keyakinan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka hanya menghormati dan mendengar perintah Kyai, orang tua, guru, alat negara dan pemerintah. Di luar golongan tersebut, golongan lainnya dianggap rendah derajatnya.

Dalam aspek tertentu, orang Madura menganggap rendah orang Melayu karena mereka penakut, cepat mengalah, suka merajuk, dan mudah ditipu. Terhadap orang Dayak, orang Madura menganggap mereka berderajat rendah karena kafir, gampang ditipu karena suka minum-minuman keras dan berjudi, tetapi mereka takut pada orang Dayak karena biasa berubah menjadi beringas dan siap bertempur dan membunuh orang Madura. Dalam situasi yang demikian itu terdapat pula orang-orang Madura menggunakan kesempatan untuk mencuri, merampas, menipu melalui perjudian dan merampas hak milik (tanah, sapi, dan sebagainya) orang Melayu dengan berbagai cara dan menggunakan logika yang aneh.

4. Dominasi Kekerasan

Pendominasian perilaku kelompok etnik Madura khususnya di Kabupaten Sambas dengan cara kekerasan atau dengan ancaman sepihak dalam kehidupan ekonomi, sosial dan politik untuk menguntungkan pihak-pihak Madura juga memperuncing pembentukan stereotif negatif

kelompok etnik Madura. Kondisi ini dimungkinkan karena kurang atau belum efektifnya pemerintah daerah setempat dan polisi serta aparat keamanan dalam menegakkan keadilan dan memberi rasa aman warga setempat yang bukan Madura.

Sebagai reaksi dari fenomena pendominasian tersebut, maka kekerasan dan brutalisme yang dilakukan orang-orang Melayu merupakan pelampiasan atas kekerasan yang dilakukan secara sepihak oleh orang-orang Madura selama puluhan tahun. Cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak muda Melayu terhadap orang-orang Madura dalam kerusuhan Sambas (1999) dalam bentuk mutilasi tubuh dan berbagai perbuatan sadis adalah pola yang biasa digunakan oleh orang-orang Madura dalam mendominasi hubungan antar-etnik.

C. Akselerator Konflik Sosial

Setidaknya terdapat 4 faktor yang mempercepat terjadinya konflik sosial di Kupang, meliputi; (1) pertarungan simbol dan longgarnya hubungan antar-etnik, agama, suku dan golongan. (2) Kriminalitas, perkelahian dan

potensi konflik dari aspek keamanan. (3) Perubahan perkembangan, lokasi dan perilaku dalam hubungan sosial. (4) Politisasi agama dan etnik dalam birokrasi.

Pertarungan agama sebagai sarana pemicu konflik, sejak tahun 1995-1997 seperti terlihat pada kasus kerusuhan di Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Pekalongan maupun kerusuhan Ketabang, merupakan kondisi umum yang turut mempengaruhi, minimal memori sosial yang menyentuh sensitivitas primordial kelompok.

Di Kupang, hubungan antarumat beragama lebih bersifat longgar, karena agama belum mampu menjadi akar perekat hubungan sosial. Hubungan sosial lebih dilihat dalam lingkup dan koridor keetnikan yang diikat oleh perkawinan sebagai alat pemersatu. Menurut *Gomang (2000)*, NTT menyimpan sejarah sosial sebagai daerah yang penuh dengan berbagai konflik sosial, bahkan *Metzner dan Gomang (2000)* menyimpulkan bahwa rendahnya populasi penduduk pulau Timor dan sekitarnya di masa lalu disebabkan oleh perang antar-suku. Sementara itu konflik berdimensi agama pernah terjadi antara Islam melawan Katolik di Ende tahun 1614 s/d 1627. Sedangkan di

Pulau Timor pernah terjadi perang segitiga antara Belanda yang Protestan dengan sekutu-sekutunya melawan Portugis dan Topassis yang berakhir setelah ada perjanjian Lisabon tahun 1859 yang membagi Pulau Timor dan sekitarnya dalam domain agama-agama.

Kemudian dari aspek kriminalitas dan keamanan di masyarakat Kupang menunjukkan angka kejahatan pembunuhan yang signifikan. Data Kodya setempat tahun 1998 mencatat jumlah narapidana dari kejahatan pembunuhan sebanyak 138 orang dari narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan (60%). Pada saat yang sama, rasio aparat polisi dengan jumlah penduduk (1:2.500) sehingga mempengaruhi pelayanan dan proses deteksi dini aparat keamanan atas gejala konflik. Setelah polisi lepas dari TNI, satu orang polisi harus mengawasi dan membina 3 sampai 5 desa. Arus lain yang mempercepat konflik adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dimana sebanyak 111.937 orang tidak berpendidikan atau hanya memperoleh pendidikan dasar. Akibatnya perkelahian massal antar-kelompok atau etnik seringkali terjadi karena secara budaya mereka terbiasa dengan "kekerasan" atau bertipe keras dan temperamental.

Dalam konteks perkembangan perilaku dan hubungan sosial, konflik di Kupang dipercepat oleh tersumbatnya hubungan komunikasi antara pendatang dan pribumi sehingga komunikasi antar-suku berkembang atas dasar prasangka dan stereotif. Dalam kerusuhan 30 November 1998, di Naikoten I dan Koenino, peran serta penduduk setempat yang melakukan pembakaran terlihat dominan.

Selain faktor-faktor yang sudah disebut, politisasi agama dalam birokrasi dan kekuasaan ikut mempercepat konflik terbuka di Kupang. Format politik maupun birokrasi dikaitkan dengan masalah perimbangan kekuatan dan jumlah penduduk agama. Kerusuhan 30 November 1998 adalah produk dari pertarungan etnik tertentu atau orang tertentu yang menggunakan agama sebagai jalan masuk untuk mencapai kepentingannya. Jaran birokrasi didominasi oleh penduduk beragama Kristen karena masyarakat yang beragama Kristen mencapai 87,03%. Kepemimpinan politik juga dikuasai oleh kelompok Kristen. Bahkandi kalangan intelektual seperti di Universitas Cendana, agama ternyata masuk sebagai perantara politik dalam suksesi calon rektor.

Politisasi etnik dalam jabatan-jabatan politis dan birokrasi pemerintahan juga menjadi akselerator peritikaian antar-etnik di Kalimantan Barat. Sebagai contoh pada tahun 1999 di Kabupaten Mempawah terjadi konflik antar-etnik Melayu dan Dayak, serta pembakaran Kantor DPRD Tingkat II oleh etnik Dayak karena ketidakpuasan mereka terhadap proses pemilihan calon utusan daerah yang akan duduk di MPR-RI. Kemudian di Kabupaten Patussibau karena mayoritas penduduknya Melayu, maka Bupati di wilayah ini berasal dari etnik Melayu dan wakilnya dari etnik Dayak. Begitu juga di Kabupaten Sintang dan Mempawah yang didominasi etnik Dayak yang menjadi Bupati berasal dari etnik Dayak dan wakilnya berasal dari etnik Madura.

Namun demikian, dalam aspek lain akselerator konflik sosial di Kalimantan Barat agak berbeda dengan yang terjadi di Kupang, antar lain berkurangnya daya dukung lingkungan dan pola hubungan ekonomi yang tidak seimbang, segregasi pemukiman, dan perilaku aparat tatkala hukum tak lagi tegak.

Produk domestik regional bruto Kalimantan Barat tahun 1998 sebesar 15.666,18 milyar (urutan ke-13 secara nasional)

namun sekitar 85% penduduknya miskin. Walaupun sumber daya alam melimpah, namun dari segi pengolahan kurang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Dalam pengelolaan hutan, pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dilaksanakan tanpa menyertakan masyarakat setempat, dan tidak ada pengawasan yang memadai oleh negara terhadap pemberian lisensi kepada pemegang HPH yang terbukti memiliki andil besar bagi proses perusakan lingkungan, sementara kerusakan itu berdampak merugikan bagi sektor pertanian seperti kekeringan, pemanasan bumi, erosi, hama dan penyakit. Penduduk setempat yang bekerja di sektor pertanian hingga tahun 1995 mencapai 66,47%, kemudian menjadi bagian kelompok masyarakat yang paling menderita dan menjadi marginal akibat kebijakan HPH.

Sementara sasaran akselerator kerusakan sosial segregasi pemukiman tampak dari terkonsentrasinya pola pemukiman khususnya etnik Madura, membangun tempat ibadah tersendiri, terpisah dalam cara melaksanakan ibadah. Apabila komunitas Madura mencapai 40 orang, mereka mendirikan mesjid, memiliki ulama *tau khabib* dan imam dari kalangan sendiri, menggunakan bahasa Madura

dalam berkhotbah bahkan zakat fitrah dibayarkan bagi lingkungan sendiri dan dikelola dengan mereka sendiri.

Sedangkan perilaku aparat ketika hukum tak lagi tegak tampak melemah sehingga merupakan alasan tersendiri dan utama mengapa tindak kriminal dan premanisme merebak di kawasan Sambas. Hasil wawancara Ketua FKPM, Abdul Hakim 26 Agustus 2000 di Pemangkat diperoleh informasi pihak kepolisian di tingkat kecamatan tidak memiliki wibawa dan keberanian yang cukup menghadapi orang-orang Madura. Beberapa kasus kriminal ada yang ditangani, namun sebagian besar dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa tindakan hukum apa pun. Aparat Polsek dan Koramil sejak awal telah tersandera oleh solidaritas etnik masing-masing. Di Jawai seluruh desa bergolak dan aparat tak lagi mampu mengendalikan situasi, karena secara kebetulan di antaranya ada yang berasal dari etnik yang bertikai yakni Madura dan Melayu. Hasil penelitian tim peneliti PPSK mensinyalir tatkala konflik telah meletus, aparat keamanan gagal melokalisir kerusakan. Ada kesan aparat keamanan tidak menduga bahwa konflik bisa melebar sedemikian luas dan massif.

Kemudian faktor akselerator kerusuhan di Mataram meliputi : *Pertama*, pers yang cenderung membesar-besarkan pemberitaan tragedi Ambon/Maluku, sehingga selain langsung maupun tak langsung turut serta memanas-manasi situasi. Sebelum kasus 17 Januari 2000 *head line* utama surat kabar lokal (Lombok Post) menampilkan berita utama tentang pembantaian enam ribu kaum muslim di Maluku).

Kedua, dampak dari pergulatan elite politik (sipil maupun militer) di Jakarta. Kehadiran Eggy Sudjana (Ketua Umum PPMI dan fungsionaris Partai Bulan Bintang) 17 Januari 2000 menimbulkan kontroversi karena nama Eggy Sudjana tidak tercantum dalam tabligh akbar yang berlangsung tanggal 17 Januari 2000 tersebut. Di sisi lain, ada yang berkeyakinan bahwa Eggy tidak terlibat dalam kerusuhan Mataram, tetapi hanya dipakai untuk menutup-nutupi sang "dalang" yang sesungguhnya. Tentara seperti membiarkan konflik ini. TNI seperti sedang memanfaatkan berbagai gejolak itu sebagai momentum *bargaining* dalam menentukan eksistensinya ketika tentara tak lagi segala-galanya dalam zaman yang telah berubah.

Ketiga, kesenjangan sosial ekonomi, terutama antara warga pribumi dan Cina. Pengusaha Cina cenderung mempekerjakan tenaga-tenaga dari luar daerah dan rumah-rumah mereka dibangun dengan pagar tinggi (sehingga membangkitkan kesan seakan-akan warga Sasak itu maling). Dengan uang warga laki-laki Cina tak jarang melakukan kawin paksa dengan wanita Sasak. Etnis Cina cenderung hidup eksklusif, dimana mereka lebih suka tinggal di kawasan pemukiman kaum Hindu, ketimbang berbaur dengan warga Sasak.

Keempat, faktor solidaritas terhadap kaum Muslim yang menjadi korban tragedi di Ambon/Maluku. Tabligh Akbar 17 Januari 2000 dimaksudkan sebagai forum penggalangan dana dari umat Islam di Mataram dan sekitarnya bagi kaum Muslim yang menjadi korban tragedi Ambon/Maluku.

Kelima, dampak perubahan kebijakan di tubuh TNI dan POLRI dimana TNI hanya bertanggung jawab di bidang pertahanan sedangkan masalah keamanan menjadi tanggung jawab POLRI sehingga menimbulkan kesan saling lempar tanggung jawab antara TNI dan POLRI dalam menghadapi peristiwa kerusuhan sosial politik. Di sisi lain, polisi

masih belum sepenuhnya mampu melepaskan diri dari “gaya” tentara terutama dalam menghadapi massa tak bersenjata.

D. Faktor Pemicu Terjadinya Kerusuhan

Berkaitan dengan peristiwa kerusuhan 17 Januari 2000 di Mataram yang bernuansa SARA, pandangan nara sumber dari kalangan Islam dan Kristen tampaknya ada kemiripan, dimana peristiwa tersebut merupakan rekayasa dari suatu kekuatan yang memiliki kemampuan yang sangat canggih. Secara implisit tuduhan itu diarahkan ke “oknum-oknum” di tubuh aparat. Sebagai contoh para perusuh berhasil mengidentifikasi dengan sangat tepat setiap rumah milik kaum Kristiani. Padahal tempat tinggal kaum Kristiani di Lombok umumnya sudah mem-baur dengan pemukiman kaum Muslim. Faktor lain adalah terbakarnya gereja besar yang terletak di dekat Makodim, dan aksi perusakan gereja justru terjadi ketika acara tabligh akbar masih berlangsung. Artinya aksi perusakan kecil kemungkinan dilakukan oleh umat yang menghadiri tabligh akbar, dan ketika gereja terbakar massa baru datang dan aparat hanya menonton tanpa bertindak untuk mencegah.

Kendati isu bakal adanya kerusuhan sudah menyebar dua hari sebelum tabligh akbar, tidak tampak adanya kesigapan pihak aparat untuk mencegah. Bahkan pasca kerusuhan 17 Januari 2000 hampir setiap minggu ada upaya memanans-manasi dari kelompok pemedara motor yang berpenampilan mirip aparat. Aparat kepolisian sendiri menghembuskan isu bakal adanya kerusuhan susulan, termasuk tanggal 17 Juli 2000 karena bertepatan dengan peristiwa 17 Januari 2000.

Kemudian kerusuhan di Kupang tanggal 30 November sampai dengan 2 Desember 1998 pada awalnya dimulai dari penyelenggaraan aksi perkabungan atas berbagai kerusuhan berdimensi agama di kota-kota lain. Isu agama dimainkan di sini, dimana dalam peristiwa Ketapang, di Kupang (yang mayoritas penduduknya beragama Kristen) telah tersiar kabar adanya 21 gereja terbakar dan akan muncul skenario lanjutan. Dokumen resmi Pemda Tk. I NTT, Kodya Kupang, Polres Kodya Kupang maupun berbagai sumber lainnya menyebut bahwa penyelenggaraan acara perkabungan yang dilakukan oleh organisasi pemuda GEMA KIRSTI tanggal 30 November 1998 dilatarbelakangi oleh isu di atas, dan merupakan sarana awal bagi terjadinya

kerusuhan. Acara perkabungan tersebut cukup "sukses" memancing kemarahan umat Kristen di Kupang sehingga muncul kerusuhan.

Hal tersembunyi yang menjadi pemicu kerusuhan setelah diantar oleh acara perkabungan adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi sebelumnya di wilayah lain (di luar Kodya Kupang). Ada juga anggapan bahwa pemicu kerusuhan (*triggerring factor*) adalah provokator atau orang luar. Dugaan ditangkapihnya seorang preman yang mengaku bersama 400 orang lainnya yang disuruh menyerang kelompok laki-laki di Ketapang, dan temuan *Kontras* atas penggunaan preman dalam kerusuhan Ambon dan Maluku, menguatkan dugaan bahwa kerusuhan Kupang 30 November 1998 merupakan skenario kelompok luar.

Kemungkinan adanya provokator juga memicu pertikaian di Sambas Kalimantan Barat, yang melahirkan rasa kebencian mendalam antar-etnik. Pertikaian ini berlandaskan isu SARA yang memang rawan konflik. Pihak TNI/Polri dan aparat keamanan sendiri berpendapat bahwa meluasnya konflik horizontal yang umumnya semula berawal dari persoalan-persoalan pribadi yang sepele tak terlepas dari peranan para provokator di lapangan.

Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) mendapati adanya upaya oknum tentara untuk turut memojokkan, memfitnah etnik Madura, seraya memberikan suplai peluru kepada etnik Melayu dan Dayak untuk melakukan penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang Madura. Etnik Madura melihat adanya oknum aparat yang melakukan tindakan berat setelah tanpa memberi kesempatan bagi etnik Madura untuk melakukan perlawanan.

Terlepas dari kebenaran dokumen temuan PSPK dan ada atau tidak adanya isu provokator, tindakan kekerasan berupa penganiayaan dan pembunuhan merupakan faktor pemicu lain dalam pertikaian di Sambas. Peristiwa Sanggau Ledo berawal dari perkelahian antar-lima orang pemuda, tiga di antaranya suku Madura, satu suku Jawa dan satu suku Ambon dengan tiga orang pemuda suku Dayak tanggal 25 Desember 1996 sementara itu kerusuhan etnik Melayu melawan Madura tahun 1999 terjadi dalam tiga fase. Fase pertama dipicu oleh usaha pencurian yang berlanjut dengan pemukulan terhadap Hasan (Madura) sehingga mendorong kelompok Madura melakukan penyerangan dan pembunuhan pada hari Idul Fitri 1419 H. Fase

kedua dipicu oleh penusukan Rusdi di Sui Nyirih dan Bujang Lebig di Semparuk yang dilakukan oleh kelompok Madura sehingga menyebabkan pembakaran rumah di Kecamatan Jawai dan Kecamatan Pemangkat. Fase Ketiga, dipicu oleh kematian orang Dayak yang dilakukan oleh oknum Madura sehingga menyebabkan konflik dengan kekerasan me-

nyebar dan meluas di Kabupaten Sambas.

E. Solusi atas Akar Masalah dan Akselerator Kerusakan

Sejumlah solusi untuk masing-masing wilayah kerusakan meliputi solusi jangka pendek dan panjang. Hal mana masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 terlampir.

Tabel 1
Solusi Kerusakan Kupang

Kategori	Solusi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
<p>Sumber masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rivalitas sumber ekonomi antara pendatang dan penduduk asli. 2. Pengangguran penduduk asli yang tinggi. 3. Kemiskinan penduduk asli hampir 60 persen. 4. Ketimpangan modal antara penduduk asli dengan pendatang. 5. Kecemburuan sosial penduduk asli terhadap pendatang. 	<ul style="list-style-type: none"> * Perlunya program ekonomi multikultural. Artinya program ekonomi harus memperhatikan komposisi penduduk atas dasar suku, agama, etnik maupun antargolongan. * Identifikasi masalah ekonomi di Kupang, terutama masalah ekonomi penduduk asli, sebagai upaya untuk membuat kebijakan dan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. 	<ul style="list-style-type: none"> * Terciptanya kesejahteraan ekonomi masyarakat secara adil dan proporsional. * Kebijakan-kebijakan ekonomi-politik harus berpihak dan melindungi ekonomi rakyat (ekonomi kecil) agar tetap bertahan. * Pemanfaatan sumber daya alam secara berimbang dari segi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan.

Kategori	Solusi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
	<ul style="list-style-type: none"> * Program kerjasama dengan LSM maupun lembaga lainnya untuk pengentasan kemiskinan, kemampuan berusaha, peningkatan skil, SDM, dll. * Trainning mengenai manajemen dan peluang usaha bagi rakyat luas: Peningkatan kualitas SDM dan fasilitas bagi usaha-usaha kelautan yang lebih merata dan melibatkan penduduk asli. * Kredit Usaha Kecil bagi penduduk asli dan pendatang harus disamaratakan, terutama untuk kredit-kredit non konsumtif. 	
<p>Akselerator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertarungan etnik dan agama dalam sejarah sosial NTT. 2. Politisasi dan persaingan agama dalam birokrasi dan kekuasaan. 3. Masalah keamanan, kriminalitas dan perkelahian pemuda (premanisme). 	<ul style="list-style-type: none"> * Depolitisasi SARA dalam birokrasi dan kekuasaan. * Pemerintah Daerah harus mengembangkan fungsinya sebagai pelayan dan pengayom masyarakat secara umum, bukan atas dasar primordial. 	<ul style="list-style-type: none"> * Melakukan kegiatan bersama antar SARA agar terjadi komunikasi multikultural. * Pendidikan di tingkat lokal diupayakan memberikan pemahaman atas sejarah sosial, budaya NTT agar terjadi pema-

Kategori	Solusi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
4. Segregasi sosial-solidaritas mekanik (lebih ke etniknya).	* Meningkatkan kualitas aparat keamanan di daerah. Gejala-gejala pertumbuhan premanisme dan kriminalitas harus segera dicegah.	haman bersama antar-kelompok. * Perlunya ruang dialog antarwarga baik dari suku, agama, maupun golongan yang berbeda, untuk saling memahami dan mendiskusikan berbagai masalah yang sedang terjadi.
5. Masalah pengungsi yang tidak segera di atasi, memicu konflik dengan penduduk asli.	* Politisasi massa dalam setiap kegiatan harus dicegah. Aparat keamanan harus menata diri dan mengembalikan citranya agar masyarakat percaya atas kinerja mereka.	* Memberdayakan kembali pranata-pranata sosial di NTT, untuk menjembatani atau menyelesaikan bila terjadi konflik atau pertentangan.
6. Tidak siapnya aparat keamanan mengantisipasi keadaan pra dan pada kerusuhan.		
7. Kondisi hubungan antar SARA yang rapuh di Indonesia menyebabkan longgarnya hubungan sosial di tingkat nasional dan lokal.		

Sumber : Diadaptasi dari Indria Samego, dkk., hal 299 s/d 231.

Tabel 2
Solusi Kerusuhan Mataram

Kategori	Solusi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
<p>Sumber Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Provokasi para provokator dari luar dari NTB pada Aksi Solidaritas untuk kasus Ambon. 2. Konflik elite Pusat yang berimbas ke daerah. 3. Fanatisme kehidupan keagamaan di satu sisi, di sisi lain ada gejala agama lain melakukan agresivitas penyebaran agama. 4. Berlarut-larutnya konflik Ambon, Maluku. 	<ul style="list-style-type: none"> * Dialog antar-elite politik. * Penegakan hukum bagi para pelaku kerusuhan yang ditangkap. * Penyelesaian kasus-kasus bernuansa SARA di lokasi lain agar tidak merembet ke wilayah yang rawan konflik dari segi agama, ras dan etnik. * Dialog antar-umat beragama (bukan pemimpin) untuk saling memahami masing-masing. * Pendirian tempat-tempat ibadah (untuk agama apa pun) sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. 	<ul style="list-style-type: none"> * Dialog antar-elite politik dan masyarakat. * Akses masyarakat untuk melaporkan dan mengadukan persoalannya kepada birokrasi dan pemimpin. * Otonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal serta demokratisasi.
<p>Akselerator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Pamswakarsa (Pasukan Ambpibi) dari rencana awal untuk mengamankan acara Tablig Akbar di Mataram. 2. Kesenjangan sosial-ekonomi, khususnya antara 		

Kategori	Solusi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
<p>pendatang dan penduduk asli.</p> <p>3. Pemberitaan media massa yang tidakimbang dan cenderung provokatif.</p> <p>4. Perubahan kebijakan di tubuh TNI-Polri, mengakibatkan saling lembar tanggung jawab terhadap keamanan di Mataram.</p> <p>5. Kurangnya koordinasi antar TNI dan Polisi dalam menghadapi ancaman kerusuhan massa.</p> <p>6. Tersumbatnya jalur komunikasi antara masyarakat dan pemimpin (baik formal maupun informal)</p> <p>7. Pola pemukiman yang cenderung atas dasar pengelompokan etnis, ras dan golongan, khususnya antara warga Hindu-Bali dan Muslim Sasak, berkaitan dengan akar sejarah yang rivalitas keagamaan yang panjang.</p>	<p>* Pemerintah perlu memperbanyak pembangunan rumah model BTN atau PerumPerumnas, yang terbukti dapat menciptakan suatu pola pemukiman yang heterogen.</p> <p>* Perlu kode etik untuk media massa dalam memberitakan kasus-kasus konflik dan kerusuhan.</p> <p>* Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah umum (negeri) untuk menciptakan asimilasi sosial sejak dini.</p> <p>* Kebijakan pembangunan untuk memberdayakan masyarakat lokal dari kemiskinan dan kesenjangan sosial.</p> <p>* Forum komunikasi antar-warga, etnik dan pemimpin baik formal maupun non-formal.</p> <p>* Penertiban kelompok-kelompok Pamswakarsa yang ada di tingkat lokal.</p>	<p>* Pemerintah perlu memperbanyak pembangunan rumah model BTN atau PerumPerumnas, yang terbukti dapat menciptakan suatu pola pemukiman yang heterogen.</p> <p>* Perlu kode etik untuk media massa dalam memberitakan kasus-kasus konflik dan kerusuhan.</p> <p>* Meningkatkan kualitas sekolah-sekolah umum (negeri) untuk menciptakan asimilasi sosial sejak dini.</p> <p>* Kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada aspek pemerataan dan keadilan.</p> <p>* Kebijakan pembangunan yang lebih berpihak pada aspek pemerataan dan keadilan.</p> <p>* Forum komunikasi antar-warga, etnik dan pemimpin baik formal maupun nonformal.</p>

Kategori	Solusi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
		<ul style="list-style-type: none"> * Pembubaran kelompok-kelompok pengalam "liar" yang ada di masyarakat digantikan oleh alat keamanan negara. * Upaya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan dengan cara membenahi struktur TNI dan Polisi di daerah.

Sumber : Diadaptasi dari Indria Samego, dkk, hal. 232 s/d 234



Tabel 3
Solusi Kerusuhan Sambas

Kategori	Solusi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
<p>Sumber masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik kultural antar etnik Madura dan etnik Dayak yang sudah berlangsung lama. 2. Akumulasi tindak kekerasan antar-etnik dengan Madura dengan Melayu dan Dayak. 3. Hubungan antar-etnik lebih berwujud rivalitas dan konflik. 	<ul style="list-style-type: none"> * Perlunya faktor penyeimbang (<i>neutralization faktor</i>) terhadap sistem nilai budaya Madura di Sambas. * Dialog antar-etnik dengan memanfaatkan lembaga-lembaga adat yang ada untuk proses pembentukan MOU dan rekonsiliasi. * MOU dan rekonsiliasi antara warga Dayak, Madura, Melayu dan Cina untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. * Pengembalian fungsi lembaga adat sebagaimana mestinya. * Penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran dan pelaku kejahatan seperti pembunuhan, pertengkaran dan lain-lain tanpa pandang bulu. 	<ul style="list-style-type: none"> * Perlunya faktor penyeimbang (<i>neutralization faktor</i>) terhadap sistem nilai budaya Madura di Sambas. * Dialog antar-etnik dengan memanfaatkan lembaga-lembaga adat yang ada untuk proses pembentukan MOU dan rekonsiliasi. * MOU dan rekonsiliasi antara warga Dayak, Madura, Melayu dan Cina untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan. * Pengembalian fungsi lembaga adat sebagaimana mestinya. * Penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran dan pelaku kejahatan seperti pembunuhan, pertengkaran dll.

Kategori	Solusi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
<p>Akselerator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkurangnya daya dukung lingkungan bagi masyarakat asli (Dayak) seperti tanah yang tercemar, penebangan hutan (HBH) yang merugikan masyarakat lokal, krisis ekonomi, kemiskinan, dll. 2. Pergeseran sumber-sumber ekonomi vital di Sambas kepada pendatang (terutama penduduk yang beragama Islam). 3. Segregasi pemukiman antara penduduk asli dengan pendatang. 4. Terganggunya interaksi antara etnik. Interaksi lebih berciri ke dalam, dan prasangka (kecurigaan) lebih tinggi dibandingkan dengan keharmonisan. 5. Ketidaktegasan aparat keamanan (polisi) terhadap premanisme, tindak kekerasan dan pembunuhan oleh oknum beretnis Madura. 6. Lambannya aparat keamanan dan birokrasi dalam menangani konflik antar-etnik. 		

Kategori	Solusi	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
<p>7. Ketidakpastian penegakan hukum atau hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya.</p> <p>8. Politisasi etnik dalam perebutan kekuasaan dan birokrasi lokal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Pembatasan dan penangkapan bagi para eksplorator sumber daya alam (HPH maupun perusahaan) yang tidak ramah dan merusak lingkungan. * Pengembangan prana-pranata yang dapat menumbuhkan <i>cross cutting loyalties</i> dan <i>cross cutting affiliation</i> serta pranata yang mampu melakukan kontrol sosial, baik preventif maupun represif terhadap berbagai kecenderungan terjadinya <i>social disorder</i> di masyarakat. * Penduduk asli Kalimantan Barat mesti dilibatkan dalam kegiatan perkebunan oleh PTP maupun perusahaan hutan oleh HPH. * Memberikan kesempatan terhadap kelompok-kelompok etnik yang ada secara bergilir atau kombinasi dalam jabatan-jabatan birokrasi sipil maupun politis. 	<ul style="list-style-type: none"> * Pembatasan dan penangkapan bagi para eksplorator sumber daya alam (HPH maupun perusahaan) yang tidak ramah dan merusak lingkungan. * Mengubah pola pemukiman dan okupasi yang tersegregasi menjadi lebih membaur. * Membangun proses adaptasi dan interaksi sosial antar penduduk asli dan pendatang, sehingga menghasilkan kerjasama dan integrasi (sosial dan ekonomi). * Rekrutmen jabatan-jabatan politis dan birokrasi dilakukan secara transparan yang didasarkan pada kapabilitas dan bukan primordial.

Sumber : Diadaptasi dari Indria Samego, dkk, hal. 235 s/d 238